

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Peningkatan Efektivitas Pencegahan Fraud dan Pengelolaan BUM Desa Boyolali

Stefani Chrystabel* dan Surya Raharja

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto No.13, Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia

Article info

Keywords:

Accounting Information Systems for Village Owned Enterprises, Fraud, and Village Owned Enterprises.

Kata Kunci:

Badan Usaha Milik Desa, Fraud, dan Sistem Informasi Akuntansi BUM Desa

ISSN (print): 2598-7763

ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:

Name: Stefani Chrystabel

Tel./Fax. No.

E-mail:

Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing the role of accounting information systems in efforts to prevent fraud and manage BUM Desa for BUM Desa Boyolali in Boyolali Regency (hereinafter referred to as BUM Desa Boyolali). This study used a qualitative method with a phenomenological approach and analyzed using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data validity was also tested using data triangulation techniques. The results of this study indicate that there is a high willingness from BUM Desa Boyolali to carry out fraud prevention and management of BUM Desa using SIA. However, with the obstacles that must be faced, there are still many preparations and improvements that must be made by BUM Desa in implementing SIA in BUM Desa Boyolali.

Citation: Chrystabel, Stefani., dan Raharja Surya. (2023). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Peningkatan Efektivitas Pencegahan Fraud dan Pengelolaan BUM Desa Boyolali. *AFRE Accounting and Financial Review*. 6(1): 32-42

Abstraks

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam upaya pencegahan fraud dan pengelolaan BUM Desa bagi BUM Desa Boyolali di Kabupaten Boyolali (yang selanjutnya disebut BUM Desa Boyolali). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan dianalisis dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dilakukan pula pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kemauan yang tinggi dari BUM Desa Boyolali untuk melaksanakan pencegahan fraud dan pengelolaan BUM Desa dengan menggunakan SIA. Akan tetapi dengan adanya kendala yang harus dihadapi, masih banyak persiapan dan perbaikan yang harus dilakukan BUM Desa dalam melaksanakan penerapan SIA dalam BUM Desa Boyolali.

JEL Classification: M41, H70, G38.

DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v6i1.9142>

1. Pendahuluan

Pada era modern saat ini, sistem informasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung operasional organisasi (Taherdoost, 2021). Hal ini menyebabkan ketergantungan akan keberadaan teknologi semakin tinggi, salah satunya adalah bagi kegiatan pencatatan transaksi keuangan. Semakin kompleks suatu kegiatan operasional suatu organisasi maka akan semakin penting pula sistem akuntansi untuk diterapkan (Dewi, Kurniawan dan Yasa, 2018). Sistem infor-

masi sendiri pada dasarnya didesain untuk dapat membantu organisasi dalam pencatatan keuangan dan aktivasinya, sehingga semestinya sistem informasi dapat meminimalisir adanya risiko-risiko kecurangan (Dai, Wang dan Vasarhelyi, 2017; Firdaus, 2019; dan Sari & Prayudi, 2023).

Arti penting dari keberadaan sistem informasi tersebut tak tekecuali juga menjadi perhatian di organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa merupakan salah satu organisasi yang sangat memerlukan sistem informasi mengingat jumlah alokasi dana yang

diberikan pemerintah untuk BUM Desa (melalui dana desa) tidaklah kecil dan bahkan terus meningkat setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Selain jumlah dana BUM Desa, perkembangan jumlah unit BUM Desa juga telah mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, hanya terdapat 1.022 unit BUM Desa yang berdiri di Indonesia, namun memasuki tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 45.549 unit BUM Desa telah berhasil dibentuk (Kemendes.go.id, 2019).

Filosofi penciptaan BUM Desa yang memiliki tujuan positif ternyata tidak diimbangi dengan kenyataan bahwa pengelolaannya banyak dicurangi. Sebagai contoh kasus munculnya laporan warga desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar yang melaporkan penyelewengan didalam BUM Desa bahwa pendapatan BUM Desa yang seharusnya mencapai Rp100 juta lebih hanya dilaporkan ke publik sebesar Rp10 juta lebih (Santoso, 2019). Tindak kecurangan tersebut dapat terjadi akibat tidak adanya pembukuan yang terintegrasi sistem dan lemahnya pengendalian internal dari BUM Desa terkait, sehingga membuka peluang untuk dilakukannya tindak kecurangan (Mahmudah, 2018). Kemudian terdapat pula kasus dugaan korupsi dana BUM Desa hingga ratusan juta rupiah oleh LSM Gempar Peduli Rakyat Indonesia karena memberikan instruksi belanja tanpa disertai rincian belanja dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (Margono, 2018).

Pengawasan, pencatatan keuangan, dan dokumentasi yang lemah juga akan semakin memudahkan pelaku untuk melakukan *fraud*. Kondisi inilah yang masih banyak terjadi di lingkup pemerintahan Indonesia. Para pemegang kekuasaan di pemerintahan desa akan cenderung memanfaatkan jabatan mereka untuk mengelola data keuangan dan aktiva desa dengan tidak benar (Seputro, Wahyuningsih dan Sunrowiyati, 2017). Apabila pencatatan dan pengelolaan BUM Desa masih dilakukan secara manual maka peluang dan potensi kecurangan pengelolaan keuangan dan aktiva BUM Desa akan sangat mungkin terjadi (Firdaus, 2019; Sofyani, Atmaja dan Rezki, 2019).

Kondisi ini sejalan dengan salah satu laporan penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menunjukkan bahwa sektor anggaran dana desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak di tahun 2021, dengan jumlah kasus sebanyak 154 kasus (Anandya, Easter dan Ramadhana, 2021). Selain kasus korupsi yang meningkat, kasus penyelewengan dana dan kecurangan pelaporan keu-

angan yang dilakukan oleh para petinggi BUM Desa juga masih cukup sering terjadi dalam pengelolaan dana BUM Desa (Santoso, 2019; Saputra, 2019; Suadnyana, 2021).

Selain laporan penelitian ICW, terdapat pula beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai peran sistem informasi akuntansi. Keberadaan sistem informasi maka penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih terintegrasi dan membantu mengenali apabila terjadi manipulasi atau kecurangan pada laporan keuangan itu sendiri (Zakiah, *et al.*, 2022). Sistem informasi yang terintegrasi (misalnya dengan adanya sistem *blockchain*) dapat memperkuat sistem kontrol atas suatu pelaporan keuangan dan pencatatan atas transaksi akuntansi (Dai, *et al.*, 2017).

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan sistem informasi pada pengelolaan akuntansi desa mulai mengalami perkembangan seiring dengan adanya penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Siskeudes sendiri merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan membantu pengelolaan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, baik dalam kegiatan membuat laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban serta dalam kegiatan pengendalian internal (BPKP, 2015).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, diketahui informasi bahwa pemanfaatan sistem informasi berupa website BUM Desa dan sistem akuntansi untuk pencatatan dan pengelolaan keuangan BUM Desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUM Desa dan kinerja karyawan BUM Desa (Selamat, 2018; Pramita, 2018; Hapsari, Utami dan Kean, 2021). Bagi BUM Desa yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi pada pengelolaannya diharapkan dapat terus memanfaatkan keberadaan sistem informasi agar dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

Penelitian Atintyasputri dan Hapsari (2019) membahas mengenai implementasi siskeudes pada pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa ketika sebuah desa telah memiliki keterbukaan dengan teknologi dan ketika desa tersebut juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berpengetahuan serta berkemampuan untuk mengelola siskeudes dengan baik.

Namun, perkembangan sistem seperti SISKEUDES juga tidak luput dari kendala-kendala seperti adanya kesalahan beberapa laporan yang dikarenakan siskeudes sering mengalami *error*,

akan tetapi dengan adanya aplikasi siskeudes yang diterapkan membuat kinerja pemerintah desa semakin meningkat dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien (Malahika, Karamoy, dan Pusung, 2018; Dewi, Kurniawan, dan Yasa, 2018)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana peran sistem informasi akuntansi BUM Desa pada BUM Desa di Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* dan pengelolaan BUM Desa. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat angka kerugian yang dihasilkan dari fenomena korupsi dan pencatatan laporan keuangan yang curang, terbilang besar. Apabila fenomena korupsi dan kecurangan ini dibiarkan terus menerus maka akan semakin merugikan negara serta desa lain yang benar-benar memerlukan dana untuk pengembangan.

BUM Desa di wilayah Kabupaten Boyolali dipilih menjadi objek penelitian karena melihat adanya visi dan misi Kabupaten Boyolali yang menyatakan "Pro investasi demi mewujudkan kemajuan Kabupaten Boyolali dan meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Boyolali". Hal ini telah diwujudkan melalui beberapa pelaksanaan perjanjian yang menunjang kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembiayaan 50 warga desa dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan pengoperasian mobil Esemka untuk mobil layanan desa (Pakar, 2021; Susanto, 2018; Yulianto, 2018). Perwujudan dari visi dan misi tersebut, akan menjadi semakin baik apabila disertai dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hapsari, Utami dan Kean, 2021). Laporan keuangan yang didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan keandalan dari laporan keuangan itu sendiri (Taherdoost, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BUM Desa Boyolali sebagai pemberian gambaran bagaimana sistem informasi akuntansi dapat membantu pengelolaan kegiatan operasional unit usaha BUM Desa dan mencegah terjadinya *fraud*. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan perbaikan apa yang diperlukan BUM Desa Boyolali dalam mengatasi kendala saat menerapkan sistem informasi akuntansi. Bagi Pemerintah Desa penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan informasi tambahan terkait dengan bentuk sistem informasi yang sesuai dengan BUM Desa yang akan mendorong me-

ningkatnya efektivitas kegiatan operasional BUM Desa.

2. Literatur Review

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015).

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Selain itu, keberadaan BUM Desa memiliki maksud dan kegunaan lain yang mana dengan berdirinya BUM Desa maka perekonomian desa diharapkan dapat meningkat, aset desa menjadi semakin optimal dan dapat meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Kewajiban bagi setiap desa untuk memiliki BUM Desa adalah dalam rangka untuk memberikan semangat gotong royong dalam membangun unit-unit usaha, mengembangkan kemampuan wirausaha sekaligus meningkatkan perluasan ekonomi yang bisa dikembangkan bersama dengan masyarakat, sehingga memberikan nilai tambah bagi desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa yang susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari atas penasihat, pelaksana Operasional serta pengawas.

Sistem Informasi Akuntansi BUM Desa

Sistem informasi akuntansi badan usaha milik desa (SIA BUM Desa) adalah suatu aplikasi yang membantu proses pengelolaan manajemen administrasi dan keuangan bum desa yang dikembangkan guna mendorong bum desa mengelolanya dengan profesional dan terkomputerisasi (ditjen kesbangpol kementerian dalam negeri,

2019). BUM Desa adalah badan usaha yang menerima penyertaan secara langsung dari kekayaan desa untuk dimanfaatkan bagi memenuhi kesejahteraan warga desa, sehingga SIA BUM Desa diperlukan untuk mendorong pengelolaan yang transparan, profesional serta akuntabel.

SIA BUM Desa adalah sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan basis *offline*. Sebelum SIA BUM Desa, BPKP sudah membuat dan mengembangkan sistem keuangan desa (siskeudes) untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2015). Kemudian, BPKP merilis SIA BUM Desa sebagai upaya dalam mencegah kecurangan, serta salah satu langkah untuk melakukan perbaikan atas tata kelola dan sistem pengendalian internal di dalam BUM Desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016). Pemanfaatan sistem informasi tersebut dapat mengurangi biaya transaksi dan mempermudah bum desa mengakses dan mengelola informasi, serta mendorong kepatuhan administratif.

Fraud

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners*, *fraud* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan secara disengaja guna memenuhi tujuan dan kepentingan tertentu seperti memanipulasi atau pemberian laporan yang tidak sesuai dan tidak relevan kepada pihak-pihak lainnya yang dilakukan baik dari orang dalam ataupun luar organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lainnya secara langsung ataupun tidak langsung (ACFE, 2022). ACFE membagi *fraud* (kecurangan) dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu 1) *Asset misappropriation* atau penyalahgunaan aktiva, 2) *Fraudulent Statements* atau kecurangan laporan keuangan dan 3) *Corruption* atau korupsi. Setiap *fraud* yang ada sering kali sulit dideteksi dikarenakan pihak-pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan dan termasuk didalamnya terdapat penyalahgunaan wewenang atau perbedaan kepentingan (*conflict of interest*), penyuaipan, penerimaan yang tidak legal, dan pemerasan secara ekonomi.

3. Data dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan kondisi yang ada di BUM Desa di Kabupaten Boyolali

terkait dengan kebutuhannya akan teknologi dan sistem informasi. Pendekatan fenomenologi digunakan karena penelitian ini ingin berfokus pada eksplorasi dan pendeskripsian suatu fenomena terkait dengan urgensi kebutuhan sistem informasi yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya *fraud* dan mengelola keuangan BUM Desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari proses wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang akan digunakan merupakan teknik wawancara yang mendalam atau dikenal juga dengan istilah *in-depth interview* (Sekaran dan Bougie, 2016). Teknik ini digunakan agar pertanyaan yang diajukan peneliti dapat berkembang sesuai dengan arah jawaban dan pembicaraan dari narasumber. Proses wawancara dilakukan dengan tiga orang narasumber yang bertugas sebagai pengelola BUM Desa di Kabupaten Boyolali, yaitu Direktur BUM Desa, Sekretaris BUM Desa, dan Bendahara BUM Desa. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan Kepala Desa di wilayah terkait yang berperan sebagai penanggung jawab dan pengawas dari BUM Desa tersebut. Sementara itu, dokumentasi diperoleh melalui pengambilan gambar, catatan-catatan rapat, dokumen pencatatan keuangan unit usaha BUM Desa, laporan pertanggung jawaban dan sebagainya.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Pada tahap terakhir, kesimpulan disusun dengan mengambil pokok pembahasan dari hasil penelitian yang didasarkan pada sekumpulan bukti yang diperoleh saat wawancara dan dokumentasi bukti pendukung yang telah dipastikan keabsahannya melalui teknik triangulasi.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki perbedaan jabatan, sudut pandang, dan peran dalam BUM Desa terkait (Creswell & Poth, 2016; Moleong, 2012). Tahapan penelitian diawali dengan dilakukannya proses wawancara tatap muka dengan pengurus BUM Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Boyolali. Teknik triangulasi lain yang dilakukan yaitu penelusuran atas dokumen-dokumen yang mendukung informasi yang diperoleh dari kegiatan wawancara, seperti laporan pertanggungjawaban keuangan BUM Desa, catatan dan pembukuan keuangan BUM Desa (*soft copy Microsoft Excel*) pada program yang telah berjalan, dan dokumen-dokumen lainnya.

4. Hasil

BUM Desa di Boyolali ini pertama kali berdiri di tahun 2018. Tujuan pembentukan BUM Desa adalah guna memenuhi keinginan desa yang semakin tinggi untuk mengembangkan usaha guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa serta untuk mengembangkan pengelolaan unit usaha yang sebelumnya telah dimiliki yaitu unit usaha pengelolaan lahan parkir desa yang telah ada sejak tahun 2015 dan usaha sewa rumah toko (ruko) yang sudah ada sejak tahun 2017.

BUM Desa Boyolali ini memiliki beberapa orang pengurus yang menjadi pengelola dan penanggung jawab kegiatan usaha yang ada di BUM Desa, antara lain Bapak AN selaku Ketua Pelaksanaan Operasional BUM Desa, Ibu BD selaku Bendahara BUM Desa, dan Bapak CI selaku Sekretaris BUM Desa. Selain ketiga pengurus tersebut terdapat pula pengawas yang berasal dari Badan Pengawas Daerah yang adalah Bapak DK, dan terdapat seorang Penasehat BUM Desa yaitu Bapak EY yang merupakan Kepala Desa dari BUM Desa itu sendiri.

Seiring dengan berdirinya BUM Desa, dibentuk pula satu unit usaha tambahan yang dikelola oleh BUM Desa yaitu usaha pembiayaan yang merupakan sebuah usaha yang hampir mirip dengan usaha simpan pinjam. Akan tetapi dalam kenyataannya kegiatan yang dilakukan oleh unit usaha pembiayaan tersebut hanya kegiatan pinjaman saja dan tidak ada kegiatan penyertaan simpanan masyarakat. Dana yang diperoleh untuk modal bagi unit usaha pembiayaan berasal dari sisa dana desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal BUM Desa. Pada tahun 2019 dibentuk pula sebuah unit usaha baru yang bergerak di bidang jasa persewaan mainan anak.

Selain unit usaha tersebut, mulai memasuki tahun 2020 BUM Desa kembali mengembangkan unit usaha tambahan berupa unit usaha pengelolaan sampah. Unit usaha ini beregerak di bidang jasa angkut dan pengelolaan sampah (baik sampah rumah tangga maupun sampah dari tempat usaha atau industri) dengan menerapkan sistem keanggotaan, yang mana anggota diharuskan membayar iuran sampah sebesar Rp 50.000 perbulan.

Kemudian di tahun 2021, BUM Desa kembali menambah unit usaha dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki yaitu sungai dengan bebatuan besar dan lahan sekitar yang cukup landai. Pada lahan yang ada didirikan sebuah restoran dan area rekreasi (*rivertubbing*) dengan tetap mempertahankan lingkungan dan kondisi alam di sekitar lahan tersebut. Area wisata dan

restoran tersebut baru resmi dibuka untuk umum pada Agustus tahun 2022.

Kondisi Pengelolaan Keuangan BUM Desa

Selama kurang lebih empat tahun BUM Desa Boyolali berdiri, pencatatan keuangan bagi seluruh unit usaha BUM Desa dikelola hanya menggunakan *Microsoft Excel*. Masing-masing unit usaha memiliki pengurus unit tersendiri yang kemudian memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Bapak AN selaku Ketua Pelaksanaan Operasional.

Para pengelola unit usaha BUM Desa menyusun laporan pertanggung jawaban dari unit mereka masing-masing dengan format pelaporan yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Hal ini menyebabkan pelaporan keuangan BUM Desa yang selanjutnya dikumpulkan pada Ketua Pelaksanaan Operasional, yaitu bapak AN, menjadi kurang rapi dan sulit dimengerti jika tidak disertai dengan uraian penjelasan atau penjelasan lisan dari pengelola unit. Pencatatan setiap transaksi pada masing-masing unit usaha juga tidak dapat diawasi dengan maksimal oleh Badan Pengawas Daerah dan Ketua Pelaksanaan Operasional karena bukti pencatatan dari setiap transaksi hanya berupa nota pembelian maupun penjualan (baik nota dengan cap resmi maupun nota manual) dan kwitansi bagi unit usaha yang menyediakan jasa.

Persepsi Pengelola BUM Desa terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam wawancara yang telah dilakukan, diperoleh informasi dari Bendahara BUM Desa bahwa sebenarnya dalam pengelolaan BUM Desa memang memerlukan sebuah sistem pencatatan dan pelaporan, karena kedepannya BUM Desa diharapkan untuk dapat terus berkembang unit usahanya.

"Sebenarnya kami di BUM Desa sangat butuh aplikasi sistem akuntansinya, terutama agar kami bisa membuat laporan keuangan yang bebas error dan fraud. Karena sampai sekarang kami belum punya pembukuan standar yang terintegrasi. Transaksi dicatat sementara dan dicatat biasa saja kalau ada transaksi, tapi tidak ada jurnal atau buku besar dan akun akun hanya sekedar dicatat saja beserta notanya sehingga sebenarnya kredibilitas laporan kami masih belum terlalu bisa dipastikan" Tutur BD.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh Bu BD selama menjadi Bendahara Desa dan menggunakan siskeudes, beliau merasa semua pekerjaannya terbantu dengan adanya siskeudes. Mulai dari ketika mencatat penerimaan dana desa, pencatatan alokasi dana desa, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan sebagainya.

Akan tetapi, ketika siskeudes mengalami pembaharuan sistem dari yang awalnya berbasis offline menjadi berbasis online Bu BD merasa cukup kewalahan dan menurut beliau *update* tersebut menjadi sebuah hambatan baru bagi pencatatan keuangan desa. Alasan yang mendasari pernyataan Bu BD yaitu terkait dengan lemahnya jaringan internet yang ada di Desa Boyolali tersebut, sehingga ketika sistem informasi yang digunakan berbasis *online* dan jaringan internet lemah atau bahkan terkadang mati, Bu BD mengalami kesulitan dalam memasukkan data-data kedalam siskeudes.

"Kalau nanti BUM Desa kami diberi sistem akuntansi, saya merasa lebih baik kalau sistemnya berbasis offline saja ketimbang online. Karna terlalu repot kalau online, saya selalu berhadapan dengan masalah jaringan yang jelek disini. Kerjaan jadi butuh waktu lama untuk selesai. Kalau offline kita mengerjakan mudah, kalau sudah, hanya tinggal mengirimkan database hasil akhirnya saja ke kecamatan atau pusat". Tutur BD.

Berangkat dari pengalaman tersebut Bu BD memiliki pemikiran bahwa sebaiknya bagi BUM Desa sistem yang nantinya akan digunakan lebih baik berbasis *offline*. Berbeda dengan pemikiran Bapak B yang merasa sebuah sistem akan lebih mudah digunakan jika berbasis *online* karena dengan demikian pencatatan dan *input* data keuangan tidak perlu dilakukan secara berulang agar lebih efektif.

"Kalau BUM Desa memiliki sistem, saya lebih suka segala sistem seperti itu berbasis online karna mempermudah kita segala transaksi bisa terhubung dengan sistem lainnya sehingga pengawasan juga menjadi lebih terbuka karena kan kita bisa mengontrol secara langsung karena datanya sudah pasti terpusat. Misalnya, kan unit usaha kami lebih dari satu yang bisa saja nanti jenis usahanya berbeda, tidak hanya jasa tapi juga ada dagang. Kalau misalnya setiap unit usaha diberikan sistem itu untuk mencatat transaksi dan bersifat offline, lalu bagaimana bisa kami nanti menggabungkan 3 jenis laporan terpisah dari 3 unit tersebut? Kalau online, walau setiap usaha punya laporan sendiri dan dikerjakan terpisah, tapi kan jadi efektif kalau sistem itu terhubung dan dapat membuat laporan keuangan gabungan dari seluruh unit menjadi satu. Basis online juga mempermudah kita untuk mengoreksi kembali kalau ada yang salah, langsung ke server utamanya juga terkoreksi. Jadi saat ada indikasi yang mencurigakan kan kita bisa langsung saling konfirmasi, sehingga bisa mencegah oknum yang mau nakal" Tutur AN.

Menurut pengurus BUM Desa, keberadaan sistem informasi akuntansi dirasa akan sangat bermanfaat dalam membantu untuk pembuatan laporan keuangan, pencatatan aset, serta sebagai

sebuah catatan untuk pertanggungjawaban kepada pengawas BUM Desa dan masyarakat Desa. Pertanggung jawaban menjadi transparan dan pendeteksian kemungkinan *fraud* semakin meningkat.

"Kalau BUM Desa sudah memiliki sistem informasi akuntansi pasti akan bermanfaat sekali buat kami. Saya pernah belajar dan menggunakan siskeudes di pemdes, dan itu sangat bermanfaat karna cuma tinggal input transaksi, lalu di proses sebentar sudah bisa jadi laporan keuangannya seara otomatis. Di BUM Desa, kami juga butuh yang seperti itu, apalagi kami sudah punya banyak unit usaha. Sementara kami belum bisa membuat laporan keuangan karna tidak punya sistem informasi akuntansi untuk mengolahnya." Tutur BD.

Berdasarkan pengalaman Bendahara BUM Desa yang juga pernah menjadi Bendahara Pemerintah Desa, menggunakan sistem informasi akuntansi dalam mengelola keuangan desa melalui bantuan siskeudes akan membuat pekerjaan lebih cepat dan praktis. Begitu juga persepsi Bendahara BUM Desa bahwa sistem informasi akuntansi bagi BUM Desa pasti memiliki sisi keberuntungan yang sangat besar bagi pengelolaan keuangan BUM Desa. Proses pelaporan keuangan juga menjadi lebih efektif dan efisien. Pencatatan dengan sistem juga memiliki manfaat yaitu sebagai salah satu pengendalian atas risiko kesalahan pencatatan, sehingga output laporan keuangan BUM Desa akan lebih akurat dan relevan.

"Kesulitan kami karna tidak ada sistem informasi akuntansi jadi masih belum mampu mengetahui secara pasti berapa pendapatan bersih kami dan tidak ada laporan keuangan membuat kami tidak dapat menilai apakah usaha kami ini meningkat atau menurun hasilnya. Selain kesulitan tersebut, kami pengurus utama BUM Desa juga sulit melakukan pengawasan terhadap kegiatan keuangan dari masing-masing unit usaha ya. Pertanggungjawabannya terkadang masih sembarangan sehingga hal ini kan harus segera diatasi agar tidak terjadi hal-hal yang mencemari BUM Desa kita ya. Kalau BUM Desa memiliki sistem informasi akuntansi BUM Desa pasti akan begitu bermanfaat untuk membantu kami. Karena mempermudah kerjaan bendahara, dan kami juga bisa melihat keadaan keuangan kami" Tutur AN.

"Saya rasa sistem akuntansi harus ada di BUM Desa karna sangat dibutuhkan untuk mencatat semua transaksi BUM Desa. Buat saya harus mencatat secara manual atas unit usaha begitu repot, ditambah saya tidak bisa lihat berapa jumlah bersih pendapatan kami dan berapa uang pinjaman yang berputar di masyarakat. Kalau ada sistem akuntansiya, pasti mudah membuat laporan keuangan sesuai kebutuhan kami." Tutur CI.

Ketua dan sekretaris BUM Desa memiliki pandangan bahwa sistem informasi akuntansi bermanfaat pencatatan aset BUM Desa dan perputaran modal BUM Desa serta dapat memproyeksikan jumlah aset yang dimiliki oleh BUM Desa serta besarnya pengembalian (laba) yang diperoleh dari unit usaha BUM Desa melalui laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, sehingga dengan adanya sistem akan membantu dalam evaluasi kinerja BUM Desa Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi BUM Desa untuk segera menerapkan dan menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mengelola pencatatan dan pembuatan laporan keuangan BUM Desa.

Upaya Penerapan SIA pada BUM Desa Boyolali

Menurut pengurus BUM Desa Boyolali, keberadaan sistem informasi akuntansi dirasa sangat bermanfaat dalam membantu untuk pembuatan laporan keuangan, pencatatan aset, serta sebagai sebuah catatan untuk pertanggungjawaban kepada pengawas BUM Desa dan masyarakat yang ada di sekitar BUM Desa Boyolali. Hal ini direalisasikan dengan adanya upaya pengurus BUM Desa dan pemerintah desa dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Pada kepengurusan BUM Desa sudah banyak pengurus unit usaha yang diberikan pelatihan dan pembelajaran mengenai *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word*.

"Para pengurus bumdes yang ada langsung di lokasi unit usaha, misalnya di unit usaha restoran ini sudah mulai kita berikan pelatihan di awal minggu untuk belajar pembukuan sederhana dengan excel atau sekedar membuat catatan pembelian persediaan bahan makanan dengan word. Pelatihan ini tidak sering, hanya sesekali saja ketika resto sedang sepi." Tuter AN.

Selain itu BUM Desa Boyolali ini juga telah melakukan kerjasama dengan sebuah universitas dalam pembentukan sistem pencatatan transaksi penjualan di tahun 2019.

"Di tahun 2019 kita pernah bekerja sama dengan salah satu universitas di Jawa Tengah, orang Fakultas Sistem Informasi untuk pembuatan aplikasi. Aplikasi tersebut di-custom khusus untuk BUM Desa Boyolali ini, nama aplikasinya "AgasoftPOS". Aplikasi ini berisi sub menu untuk pencatatan penjualan, kemudian pencatatan stok persediaan barang dan pembelian. Akan tetapi aplikasi ini baru sempat digunakan di tahun 2022 setelah ada unit usaha yang ada transaksi jual belinya karena sebelum ini unit usaha yang ada di BUM Desa kan hanya unit

usaha berupa simpan pinjam, jasa dan persewaan saja." Tuter EY.

Selain itu BUM Desa Boyolali ini juga telah memperoleh salah satu sistem informasi yang bernama Sistem Informasi Akuntansi BUM Desa (SIABUMDES). Sistem tersebut diperoleh dari BPKP yang pada bulan Oktober 2019 sempat melakukan pelatihan dan distribusi suatu sistem untuk membantu mempermudah pembuatan laporan keuangan pada BUM Desa. BUM Desa Boyolali menjadi salah satu BUM Desa yang mengikuti pelatihan dan memperoleh sistem tersebut.

"Iya kami juga sudah mengenal aplikasi SIA Bumdes yang dari BPKP, aplikasinya sudah sempat kami pelajari sendiri. Tetapi kami tetap ada kebingungan saat akan melakukan input informasi terkait BUM Desa Boyolali karena memang ada beberapa hal yang kami belum paham." Tuter BD.

Akan tetapi pada kenyataan sistem informasi akuntansi yang telah diperoleh tersebut (baik aplikasi AgasoftPOS maupun SIA BUM Desa BPKP) masih belum dipergunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan BUM Desa Boyolali secara maksimal. Diterimanya sistem informasi akuntansi BUM Desa dari BPKP oleh BUM Desa Boyolali membuat seluruh pengelola BUM Desa mulai meneliti dan memahami sistem tersebut guna penerapan SIA BUM Desa.

Kendala yang Dihadapi BUM Desa Boyolali dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam wawancara yang dilakukan, penulis memperoleh informasi bahwa salah satu kendala dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada BUM Desa Boyolali adalah sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku pengelola BUM Desa itu sendiri. Pengurus BUM Desa berasal dari warga yang ada di desa, sehingga BUM Desa harus menerima kondisi SDM yang ada dan tidak mampu menentukan kriteria tertentu untuk mengangkat seseorang untuk mengurus BUM Desa.

"Karena tujuan utama pembentukan BUM Desa kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyerap SDM dari desa kita sendiri. Baik pengurus utama seperti ketua, bendahara, sekretaris, dan ketua unit usaha serta para pengurus operasional langsung yang ada di lapangan. Kita juga tidak terlalu mempermasalahkan kemampuan orang yang akan direkrut menjadi pengurus karena adanya warga seperti itu, yang penting warganya mau untuk belajar dan berusaha. Akan tetapi kita sadar bahwa hal ini juga menjadi kendala dan kelemahan utama kami dalam mengelola BUM Desa,

karena harus mengajari dan memberikan pelatihan yang pastinya tidak sebentar” Tutur EY.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak AN yang mengatakan bahwa dengan adanya BUM Desa, warga diharapkan dapat aktif turut serta dalam pembangunan perkembangan yang ada di desa.

“Ya memang kendala utama pengelolaan BUM Desa itu SDM-nya yang sedikit dan kurang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem. Hal ini membuat kami selaku pengurus utama memiliki tanggung jawab baru yaitu memberikan pelatihan. Tapi BUM Desa kan ada untuk warga, jadi kita utamakan untuk menyerap pegawai BUM Desa yang berasal dari desa ini sendiri. Kalau kualitas SDM-nya kurang, kita adakan pelatihan agar warganya juga semakin maju. Jika desa ingin maju, harus mulai dari warganya terlebih dahulu. Warga desa di sini untungnya kompak dan memiliki kemauan untuk maju bersama-sama, sehingga kita sebagai pengurus utama BUM Desa juga tidak segan untuk menunjuk warga dalam mengelola BUM Desa” Tutur AN.

Kendala kedua adalah jaringan internet yang kurang memadai sehingga penggunaan aplikasi menjadi tidak maksimal.

“Jaringan internet di desa kami ini sebetulnya baik, akan tetapi ada saat-saat tertentu jaringan menjadi lemah atau kurang baik. Seperti saat ada keramaian dan cuaca yang buruk. Misalnya pada saat kami ingin menggunakan aplikasi AgasoftPOS di resto saat weekend. Pengunjung resto dan wisata ini saat akhir pekan sangat ramai, hal ini menyebabkan jaringan wifi yang kami gunakan menjadi down dan aplikasi yang digunakan juga down karena aplikasi kami ini kan berbasis online” Tutur CI.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu BD yang menyatakan bahwa aplikasi yang berbasis *online* akan cukup sulit dijalankan di desa ini karena kondisi internet yang masih belum stabil sehingga mampu menghalangi proses pengelolaan BUM Desa. Kendala selanjutnya adalah tidak ada pendampingan lebih lanjut terkait dengan penggunaan aplikasi SIA BUM Desa yang berasal dari BPKP.

“Terakhir pelatihan itu di tahun 2019 saja, setelahnya belum ada pendampingan lagi” Tutur AN

“Memang aplikasi sudah diberikan dan diperkenalkan, akan tetapi pendampingan berkelanjutan untuk BUM Desa kami ini belum ada. Kami pihak BUM Desa jadi kesulitan untuk mengatasi jika ada kendala dari sistemnya atau mungkin kesulitan saat akan melakukan input informasi atau transaksi unit usaha jadi sulit. Kondisinya BUM Desa kami kan memiliki berbagai jenis unit usaha, sehingga kami

terkadang bingung mengatasi transaksi-transaksi yang terkadang tidak biasa begitu” Tutur BD.

Berdasarkan keterangan yang diberikan, kendala-kendala tersebut merupakan kendala utama yang dihadapi oleh pihak BUM Desa Boyolali selama empat tahun terakhir sejak BUM Desa berdiri di tahun 2018. Hal ini menyebabkan pengelolaan BUM Desa menjadi terhambat dan tidak maksimal dalam penyusunan pelaporan keuangan.

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, teridentifikasi bahwa pada BUM Desa Boyolali sistem informasi akuntansi menjadi salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh BUM Desa. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan unit usaha yang ada pada BUM Desa Boyolali yang memerlukan pengelolaan keuangan yang terintegrasi sehingga meminimalisir keterjadian dan peluang *fraud*. Keberadaan sistem informasi akuntansi akan membantu para pengurus unit usaha untuk mengelola aktivitas unit usaha mereka masing-masing dan dapat mempermudah Ketua Pelaksanaan Operasional, Badan Pengawas Daerah untuk mengawasi transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dimasing-masing unit usaha. Pengelola BUM Desa yang pernah mengelola keuangan desa dengan SISKEUDES membantu memberikan pandangan yang positif terkait dengan keberadaan sistem informasi akuntansi pada BUM Desa. Diketahui dengan adanya sistem informasi akuntansi, data yang di-*input* akan terintegrasi dalam suatu sistem yang transparan dan dapat diawasi oleh seluruh pengelola BUM Desa. Sejak tahun 2018 dan 2019 BUM Desa telah melakukan beberapa upaya untuk menerapkan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan BUM Desa. Namun upaya-upaya tersebut menghadapi beberapa kendala yang kembali menurunkan semangat pengurus BUM Desa dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Kendala-kendala tersebut merupakan kendala utama yang dihadapi oleh pihak BUM Desa Boyolali selama empat tahun terakhir sejak BUM Desa berdiri di tahun 2018. Hal ini menyebabkan pengelolaan BUM Desa menjadi terhambat dan tidak maksimal dalam penyusunan pelaporan keuangan.

Hasil analisis dan eksplorasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat minat dan kemauan yang kuat dari pihak BUM Desa untuk menerapkan penggunaan sistem informasi akuntansi. Minat tersebut tergambar

dari pernyataan para pengurus utama BUM Desa yang mengatakan bahwa pelaporan pertanggung jawaban BUM Desa yang masih rentan *fraud* dan masih belum dapat diandalkan harus segera diatasi salah satunya dengan mengintegrasikan pencatatan masing-masing unit usaha BUM Desa dalam suatu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menjadi pilihan utama untuk mengelola pencatatan keuangan BUM Desa karena salah satu pengelola BUM Desa pernah merasakan manfaat sistem informasi akuntansi melalui SISKEUDES. Hal ini membuat para pengurus utama BUM Desa berusaha melakukan pelatihan dan pengajaran mengenai sistem informasi bagi para pengurus unit usaha BUM Desa.

Kemudian dari sisi kemauan tergambar pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pengurus BUM Desa dan Pemerintah Desa. Para pengurus BUM Desa (baik pengurus utama dan pengurus masing-masing unit) dengan sukarela melakukan pelatihan *Microsoft Excel dan Microsoft Word* bersama pengurus unit usaha BUM Desa yang masih belum begitu mahir menggunakan teknologi. Kemudian upaya lainnya juga nampak dari adanya aktivitas kerjasama dengan fakultas sistem informasi dari sebuah universitas, investasi pembuatan aplikasi *AgasoftPOS*, dan keikutsertaan Ketua Pelaksanaan Operasional BUM Desa pada pelatihan penggunaan aplikasi SIABUM Desa yang diadakan oleh BPKP.

Sikap penerimaan tersebut sejalan dengan model penerimaan teknologi atau *technology acceptance model* (TAM). TAM merupakan suatu model yang berbasis pada *theory of reasoned action* (TRA) dan telah digunakan untuk menjelaskan sikap penerimaan individu atas perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya terdapat sebuah teori yang juga menjadi dasar berkembangnya model penerimaan teknologi yaitu teori perilaku yang direncanakan (*Theory Planned Behaviour/TBP*). TBP berperan untuk membantu mengenali bagaimana perilaku seorang individu dapat diubah dan *TBP* menyarankan tindakan dari seorang manusia untuk dibimbing oleh tiga faktor yaitu keyakinan normatif, keyakinan perilaku dan adanya kontrol. Pembahasan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Firdaus (2019); Supriyati dan Bahri (2020); Widadi *et al.*, (2021); Kustinah, Hartikayanti dan Winarso (2022); serta Sabilla, Azlina dan Nurulita (2022) yang juga melakukan penelitian terkait sistem informasi akuntansi dan perkembangan BUM Desa.

6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Secara umum diperoleh hasil bahwa dalam pengelolaannya, BUM Desa Boyolali masih belum menerapkan sistem informasi akuntansi secara maksimal. Pencatatan, pengelolaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban BUM Desa dibuat secara sederhana dengan menggunakan *Microsoft Excel*. Pelaporan tersebut belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang akurat sehingga kredibilitas laporan pertanggungjawaban yang disusun juga semakin rendah. Bukti yang tidak akurat dan pencatatan yang belum terintegrasi menyulitkan pengawasan terhadap kegiatan dari masing-masing unit usaha BUM Desa. Para pengurus BUM Desa telah menyadari lemahnya pengawasan tersebut membuka peluang dan menyebabkan adanya kerentanan *fraud* dalam pelaporan pertanggungjawaban tersebut, sehingga telah dilakukan upaya-upaya menerapkan sistem informasi akuntansi untuk membantu mengelola keuangan BUM Desa.

Saran

Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh narasumber, dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan di BUM Desa. Saran yang dapat diajukan untuk penelitian berikutnya adalah melakukan pengamatan dalam pengelolaan keuangan desa secara lebih menyeluruh, tidak hanya fokus ke BUM Desa saja. Selain itu penelitian lain yang dapat dilakukan di BUM Desa adalah terkait akuntabilitas pelaporan keuangan BUM Desa.

Daftar Pustaka

- ACFE, A. of C. F. E. (2022). *Occupational Fraud 2022 : A Report to the Nations*.
- Anandya, D., Easter, L., & Ramadhana, K. (2021). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021. *Indonesia Corruption Watch*, 39.
- Atintyasputri, A. A. W., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi SISKEUDES Desa Banyuwangi. *E-Jurnal Perspektif Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana*, 2(Juni), 169-193. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/persi.v1i2.p169-193>
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, R. I. (2015). *Pengawasan keuangan desa dengan*

- aplikasi SISKEUDES - BPKP. Bpkp.Go.Id.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016). *BPKP luncurkan SIA Bumdesa sekaligus perkuat kapasitas BUMD*. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Creswell, J., & Poth, C. (2016). Qualitative Inquiry and Research Design: Chosing Among Five Approach. In L. Larson, M. Markanich, C. Pearson, H. Salmon, & J. Scappini (Eds.), *SAGE Publications Ltd.* (Fourth Edi, Vol. 3). SAGE Publications Inc.
- Dai, J., Wang, Y., & Vasarhelyi, M. A. (2017). Blockchain: An Emerging Solution for Fraud Prevention. *The CPA Journal*, 87(6), 12-14.
- Dewi, K. C., Kurniawan, P. S., & Yasa, I. N. P. (2018). Analisis efektifitas sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (studi pada badan usaha milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun). 9(3), 26-37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v9i3.20418>
- Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI. (2019). *Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa*. Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI.
- Firdaus, D. W. (2019). Develop Accounting Information Systems of Sales in Village-Owned Enterprise. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 662(2). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/662/2/022107>
- Hapsari, A. N. S., Utami, I., & Kean, Y. Y. W. (2021). Revealing the potential of fraud in the financial management of village-owned enterprise. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 98-105. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art10>
- Kemendesa.Go.Id. (2019, April). *Tercatat sebanyak 61 persen desa telah memiliki Bumdes*. Kemendesa.Go.Id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Buku pintar dana desa: dana desa untuk kesejahteraan rakyat*.
- Kustinah, S., Hartikayanti, H. N., & Winarso, E. (2022). BUMDes Management Through Accounting Information Systems at BUMDes in Cisarua District, West Bandung District. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 532-542. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.5240>
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan badan usaha milik desa (studi kasus: BUMDES Desa Sungon Legowo Bungah Gresik. *Ecopreneur*, 2(1), 52-56.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 13(4), 578-583.
- Margono. (2018). *LSM GPRI Karawang Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Bumdes*. Sinar Pagi News.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pakar, M. N. (2021). *BUMDes di Boyolali Mulai Operasionalkan Mobil Anak Negeri, Esemka - Halaman all - Serambinews*. Tribunnews.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 4, Presiden Republik Indonesia (2015).
- Pramita, Y. D. (2018). The analysis of understanding permendes no . 4 year 2015 and use of information systems on BUMDes management accountability. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(4), 1-8.
- Sabilla, M. D., Azlina, N., & Nurulita, S. (2022). The Effect of Governance and Accounting Information Systems on Village-Owned Enterprise Performance in Bengkulu District. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(3), 193-203. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.3.193-203>
- Santoso, J. (2019). *Pengelolaan BUMDEs Kecamatan Karanganyar Dilaporkan ke Kejaksanaan*. WawasanCo.
- Saputra, E. M. (2019). *Temuan Inspektorat Kabupaten Klungkung, BUMDes diduga selewengkan Rp645 juta*, - *Tribun Bali*. Tribun-Bali.Com.
- Sari, P. F. N. P., & Prayudi, M. A. (2023). Penguatan Sistem Pengendalian Internal dengan Sanksi Adat Dadia dalam Meminimalisir Kecurangan pada Tata Kelola Keuangan KSP Usaha Beraya Bopeas. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 101-110. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.12>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research method for business: a skill building approach. In *John Wiley & Sons Ltd.* (Seventh). https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_102084
- Selamat, I. K. (2016). Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi dan

- motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada BUMDes se-Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 7(2), 12-20.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jap.v7i2.21084>
- Septuro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 78-93.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44-58.
<https://doi.org/10.18196/jai.2002116>
- Suadnyana, S. (2021). *Bendahara BUMDes di Bali jadi tersangka korupsi Rp 650 juta kredit fiktif*. News.Detik.Com.
- Supriyati, & Bahri, R. S. (2020). Model Design of Accounting Information Systems for Village Owned Enterprises (BUMDes). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 879(1).
<https://doi.org/10.1088/1757-899X/879/1/012093>
- Susanto, F. A. (2018). *BUMDes Kebonan Mandiri pelopor CSR JKN-KIS*. Radarsolo.Jawapos.Com.
- Taherdoost, H. (2021). A review on risk management in information systems: Risk policy, control and fraud detection. *Electronics (Switzerland)*, 10(24), 1-23.
<https://doi.org/10.3390/electronics10243065>
- Widadi, S., Iswanto, Parwoto, & Fajrin, H. R. (2021). Business Architecture Accounting Information System of Village-Owned Enterprises with TOGAF. *2021 1st International Conference on Electronic and Electrical Engineering and Intelligent System (ICE3IS)*, 149-153.
<https://doi.org/10.1109/ICE3IS54102.2021.9649697>.
- Yulianto. (2018). *BUMDesa Kebonan Mandiri Pelopor CSR Donasi JKN-KIS di Boyolali*. Fokusjateng.Com.